

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli PKL di kawasan terlarang di sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan. Dorongan ekonomi PKL untuk berjualan di lokasi strategis ini sayangnya menimbulkan dampak negatif signifikan bagi pengguna jalan, seperti hambatan lalu lintas dan terganggunya fungsi trotoar. Selain itu, operasional rumah sakit juga terganggu, terutama terkait akses ambulans. Tindakan ini jelas melanggar Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang secara tegas melarang PKL berdagang di area terlarang seperti trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas. Terdapat benturan kepentingan antara kebutuhan ekonomi PKL dan kemudahan terbatas bagi sebagian kecil pihak, berbanding terbalik dengan kepentingan umum yang lebih luas, yaitu ketertiban, keselamatan, dan kelancaran fungsi rumah sakit. Secara keseluruhan dan tujuan dari penelitian ini adalah agar bisa menganalisa seberapa banyak manfaatnya dibanding dengan kemudharatannya bagi masyarakat sekitar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan. Data yang diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dengan berbagai narasumber yang terlibat (PKL, koordinator PKL, pengguna jalan, keluarga Pasien dan pihak keamanan RSUD Syamrabu Bangkalan). Selain itu digunakan juga sumber sekunder, data yang dapat diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber dari buku-buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pedagang kaki lima di kawasan terlarang di sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan menunjukkan bahwa *mafsadah* yang ditimbulkan oleh praktik jual beli PKL di kawasan terlarang RSUD Syamrabu Bangkalan secara signifikan lebih besar dan lebih luas dampaknya dibandingkan dengan *maṣlahah* yang dihasilkan. Pelanggaran terhadap regulasi, potensi ancaman terhadap keselamatan jiwa pasien, serta terganggunya ketertiban umum mengindikasikan bahwa praktik ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *maṣlahah* yang mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah kemudharatan yang lebih luas. Oleh karena itu, tindakan penertiban oleh pihak berwenang memiliki landasan yang kuat berdasarkan perspektif *maṣlahah*, dengan tetap mempertimbangkan upaya penyediaan solusi yang adil bagi para PKL agar keberlangsungan ekonomi mereka dapat diakomodasi tanpa mengorbankan kepentingan umum yang lebih utama.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, *Maṣlahah*, Kawasan Terlarang

ABSTARCT

This study examines the practice of street vendors (PKL) in prohibited areas around Syamrabu Bangkalan Hospital. The economic drive of PKL to sell in strategic locations unfortunately causes significant negative impacts on road users, such as traffic congestion and disruption of sidewalk functions. Moreover, hospital operations are also disrupted, particularly regarding ambulance access. This action clearly violates Bangkalan Regent Regulation Number 19 of 2009 on Arrangement and Guidance of Street Vendors, which strictly prohibits PKL from trading in prohibited areas such as sidewalks, road bodies, and other public facilities that can disrupt public order and traffic flow.

There is a conflict of interest between the economic needs of PKL and the limited convenience for a small group, which is inversely proportional to the broader public interest, namely order, safety, and smooth functioning of the hospital. Overall, the purpose of this study is to analyze the benefits and harms of PKL practices for the surrounding community. This study uses a descriptive qualitative method with a field approach. Data is obtained from primary sources through interviews with various stakeholders (PKL, PKL coordinators, road users, patient families, and hospital security officers). Secondary sources are also used, including literature and legal documents.

The results of this study show that the practice of street vendors in prohibited areas around Syamrabu Bangkalan Hospital has significant negative impacts that are greater and more widespread than the benefits. Violations of regulations, potential threats to patient safety, and disruptions to public order indicate that this practice is not in line with the principles of maṣlahah, which prioritizes greater benefits and prevents broader harm. Therefore, enforcement actions by authorities have a strong basis from the perspective of maṣlahah, while still considering efforts to provide fair solutions for PKL to accommodate their economic sustainability without sacrificing broader public interests.

Keywords: Street Vendors, Maṣlahah, Prohibited Areas